

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Etika dalam bantuan kemanusiaan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book chapter
Authors	Soerjodibroto, Tjahjono
Publisher	Globethics.net
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-01 00:08:49
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/208042

7 | Etika dalam Bantuan Kemanusiaan

TIAHJONO SOERJODIBROTO

Pendahuluan

Masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama saat terjadi bencana alam, kadang hanya dianggap sebagai obyek program; bahkan ada yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggali dana dari para donatur untuk keuntungan diri sendiri. Saat tsunami melanda Aceh akhir 2004, misalnya, banyak sekali organisasi kemanusiaan yang muncul pada saat penanganan bantuan untuk para korban. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya. Ada yang sebenarnya tidak memahami bagaimana melakukan bantuan kemanusiaan. Mereka sekedar menyalurkan bantuan baik dalam bentuk dana maupun barang tanpa mempedulikan apakah tepat sasaran atau tidak, tanpa mempedulikan apakah berdampak positif atau justru berdampak negatif. Pasca gempa bumi di Yogyakarta, sekelompok masyarakat di Bantul juga sempat mengungkapkan kemarahannya dengan memasang spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa mereka bukanlah obyek wisata yang hanya untuk dijadikan tontonan.

Bantuan kemanusiaan merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak yang biasanya mempunyai agendanya

sendiri-sendiri. Sebut saja para donatur yang mempunyai ekspektasi tersendiri terlepas apakah mereka menyadari kompleksitas pelaksanaan program atau tidak. Pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga mempunyai rencana program tersendiri yang telah maupun yang belum disusun sehingga setiap program bantuan kemanusiaan selalu ingin diselaraskan dengan program besar yang mereka miliki. Masyarakat penerima bantuan adalah mereka yang menerima dampak langsung termasuk eksese-eksese negatif yang mungkin terjadi. Bisa jadi ukuran-ukuran nilai kebiasaan hidup sehari-hari, adat, maupun agama yang dianut harus dipertaruhkan; dan bisa jadi pula sangat sulit bagi pihak-pihak yang berkaitan untuk berubah atau menerima perubahan yang dipaksakan. Lembaga-lembaga kemanusiaan yang terjun membantu umumnya juga sudah mempunyai target-target yang ingin disasar atau kaidah-kaidah etika masing-masing yang harus diterapkan di lapangan.

Etika dalam Pelaksanaan Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan merupakan upaya penyaluran bantuan dari pihak donatur kepada masyarakat yang taraf kehidupan atau kondisi hidupnya dipandang kurang beruntung karena berbagai sebab. Bisa jadi ini karena keadaan alam atau bencana alam, karena ulah manusia seperti adanya konflik antar warga, terorisme, maupun tirani oleh sekelompok penguasa yang tidak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan dapat berupa dana langsung, bahan-bahan pokok, perbaikan rumah, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan lain yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak (immediate). Bantuan juga dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat secara bertahap untuk jangka panjang, seperti di bidang kesehatan (baik terkait kesehatan

terhadap penyakit maupun kebiasaan hidup sehat), pendidikan, ketahanan pangan, pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur penunjang, penyiapan masyarakat di daerah rawan bencana (disaster risk reduction), maupun penyiapan bagi mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim (climate change adaptation), dan sebagainya.

Sebuah artikel di BBC menyebutkan bahwa arti etika adalah mengenai ‘pihak lain’. Dapat dikatakan bahwa etika itu menyangkut perhatian kepada atau kepentingan pihak lain di luar diri sendiri, baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Oleh karenanya, ketika kita membahas etika dalam menyalurkan/memberikan bantuan kemanusiaan, itu berarti bagaimana menyalurkan bantuan kemanusiaan demi kepentingan pihak lain, yaitu pihak penerima yang membutuhkan. Yang utama bukanlah keinginan/kepentingan pihak yang memberi bantuan atau yang menyalurkan bantuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada keinginan tertentu dari pihak pemberi bantuan, namun yang menjadi pusat perhatian dalam etika bantuan kemanusiaan adalah memikirkan kepentingan terbaik bagi masyarakat penerima bantuan.

Dampak dari Bantuan Kemanusiaan

Berbagai bantuan kemanusiaan tidak selalu memberikan dampak yang positif walaupun tujuan awalnya umumnya sangat mulia. Kurang dipahaminya berbagai faktor yang berkaitan bisa berpengaruh pada hasil/dampak yang terjadi; bantuan kadang tidak membawa hasil optimal atau justru jauh dari sasaran yang diinginkan. Yang berdampak positif adalah sebagai berikut.

1) Menolong kebutuhan yang paling mendesak

Suatu kelompok masyarakat bisa terdampak bencana karena faktor alam (banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan yang panjang, dsb.) maupun karena ulah manusia (konflik, peperangan, terorisme, dsb.). Sebagai akibatnya kehidupan masyarakat terganggu bahkan bisa sampai membahayakan kelangsungan kehidupan mereka. Masyarakat korban bencana tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (makan, minum, obat-obatan, dan tempat tinggal) sehingga membutuhkan bantuan yang sangat mendesak sifatnya. Bantuan kemanusiaan bisa menjawab pemenuhan kebutuhan mendesak semacam ini seperti ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa Nias, gempa Yogyakarta, letusan Merapi, gempa di Jawa Barat dan di Sumatera Barat serta konflik antar kelompok masyarakat: di Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Ambon.

2) Menolong mereka yang tidak punya kemampuan

Sebagai dampak dari bencana yang dialami, masyarakat kehilangan mata pencaharian (pertanian, perkebunan, perdagangan, dsb), tidak-mampu membangun kembali rumah mereka, dan rusaknya sarana dasar seperti sekolah, puskesmas/klinik, pasar, dsb. Bantuan kemanusiaan dapat menolong masyarakat untuk bisa membangun kembali sarana pendidikan, kesehatan, bahkan hingga kemungkinan untuk memiliki rumah kembali (seperti di Aceh) dan kesempatan untuk memperbaiki mata pencaharian mereka melalui rehabilitasi dan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan.

3) Memberdayakan masyarakat miskin

Bantuan kemanusiaan untuk mengentaskan kemiskinan biasanya bersifat jangka panjang karena berkaitan dengan upaya yang lebih menyeluruh dan terintegrasi untuk memberdayakan masyarakat dampingan. Ini berkaitan dengan upaya bersama masyarakat untuk meningkatkan sarana dan layanan pendidikan, penyadaran akan pentingnya pendidikan yang baik bagi anak-anak, peningkatan gizi dan kesehatan dasar, pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan penghasilan, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas SDM, dsb.

4) Mendorong rekonsiliasi

Khusus untuk daerah yang baru saja dilanda konflik, bantuan kemanusiaan dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat setempat sehingga dapat ikut menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk upaya-upaya rekonsiliasi. Bantuan kemanusiaan yang disalurkan setelah terjadi konflik di Maluku Utara, misalnya, dimana bantuan kemanusiaan diberikan secara merata kepada semua korban konflik, telah menjadi modal untuk terciptanya rekonsiliasi. Bantuan pangan dan non-pangan dari para donor yang disalurkan oleh organisasi kami, misalnya, dimulai dengan penyaluran bantuan bagi pengungsi di daerah Ternate. Dengan penjelasan dan keterbukaan, bantuan yang sama kemudian juga disalurkan kepada para korban di daerah Malifut, Kao, Tobelo dan Galela di Halmahera Utara. Di Ternate dan Halmahera Utara akhirnya dapat disalurkan bantuan pangan dan non-pangan bagi 100.000 pengungsi. Setelah bantuan kebutuhan dasar untuk kedua pihak yang terlibat konflik

disalurkan, upaya-upaya rekonsiliasi dapat lebih mudah difasilitasi.

- 5) Advokasi yang mendorong kebijakan-kebijakan pro masyarakat
Dalam pelaksanaan program bantuan kemanusiaan terkadang dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung sehingga program bantuan tersebut dapat diterapkan dan berdampak lebih maksimal. Sebagai contoh beberapa kebijakan yang menunjang adalah kebijakan ‘Kota Layak Anak’, kebijakan ‘Konvensi Hak Anak’, kebijakan ‘Undang-undang Perlindungan Anak’, kebijakan ‘PPM Mandiri’, kebijakan ‘Keterlibatan warga dalam Musrembangdes’, dsb. Advokasi perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak lagi kebijakan yang bermanfaat bagi anak-anak dan masyarakat yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.

Sementara itu, dalam melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan, apabila tidak dilakukan secara benar/etis maka bantuan kemanusiaan tersebut dapat membawa dampak negative sebagai berikut.

- 1) Bantuan tidak sampai ke masyarakat secara penuh
Karena kurangnya tanggung-jawab dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkaitan, bantuan kemanusiaan yang sudah disediakan oleh donor kadang tidak sampai sama sekali atau tidak secara penuh disalurkan kepada masyarakat yang dituju. Hal ini bisa jadi karena disengaja (disalah-gunakan/diselewengkan) atau karena kendala-kendala lain yang tidak diantisipasi dengan baik (a.l. sarana logistik tidak tersedia, rusak saat pembelian seperti

kadaluwarsa atau kualitasnya di bawah standar, atau rusak saat dalam perjalanan).

2) Kekecewaan lembaga donor

Sering dijumpai lembaga pelaksana bantuan kemanusiaan kurang tertib dalam melaksanakan program penyaluran bantuan sehingga bantuan tidak terlaksana secara efektif dan maksimal, atau tidak dilaporkan kembali dengan benar kepada lembaga donor. Kekecewaan para donor dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan mereka dan tidak mau lagi meneruskan pendanaan bantuannya. Akibatnya, yang dirugikan adalah masyarakat yang tidak jadi mendapatkan bantuan lanjutan.

3) Program bantuan terafiliasi dengan kegiatan politik/agama/kepentingan pihak tertentu

Bantuan kemanusiaan juga bisa ditunggangi oleh kegiatan politik/keagamaan/kepentingan pihak tertentu, baik dari pihak donor atau organisasi yang menyalurkan bantuan. Akibatnya, program bantuan diarahkan hanya untuk kelompok tertentu (diskriminatif) dan tidak bersifat independen dan imparisial.

4) Program tidak optimal karena tidak belajar dari pengalaman sebelumnya

Program bantuan kemanusiaan pada umumnya berulang dari satu peristiwa/daerah ke peristiwa/daerah yang lain. Itu sebabnya, pengalaman sebelumnya – baik kegagalan atau keberhasilan — perlu dicermati agar dapat lebih efektif dalam penanggulangan bencana sejenis di masa depan. Pada banyak

kasus, antara lain karena pengalaman di masa lalu tidak/kurang didokumentasikan dengan baik, banyak kesalahan yang diulangi lagi ketika terjadi peristiwa yang mirip. Sebagai akibatnya, program bantuan tidak berjalan secara maksimal. Contohnya adalah banyaknya inefisiensi dalam penanggulangan bencana di Haiti yang sebenarnya bisa belajar dari penanganan bencana di Aceh.

5) Masyarakat menjadi manja

Bantuan kemanusiaan yang tidak memperhatikan dampak psikologis dapat mengakibatkan masyarakat menjadi manja dan bergantung pada donasi pihak luar. Pada beberapa bencana alam, lembaga-lembaga kemanusiaan berlomba menyalurkan bantuan dalam jumlah sangat besar sehingga justru mematikan inisiatif masyarakat. Kasus korban gempa di Bantul bisa menjadi contoh yaitu ketika Pemerintah mengumumkan bahwa setiap keluarga akan mendapat ganti rugi Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah yang rusak. Akibatnya, masyarakat tidak mau membereskan reruntuhan rumahnya karena takut tidak akan mendapat ganti rugi. Keluhan semacam ini diutarakan oleh para mahasiswa yang menjadi sukarelawan untuk membersihkan reruntuhan bekas gempa. Pada umumnya bantuan kemanusiaan yang kurang melibatkan masyarakat penerima dipersepsikan sebagai hadiah sehingga kurang terbentuk rasa memiliki. Lain halnya bila masyarakat dilibatkan dari awal seperti dalam pembangunan sarana air bersih, perbaikan rumah, sawah, dan jalan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung-jawab lebih besar untuk membangun dan memeliharanya dengan baik.

6) Merendahkan martabat manusia

Pihak pemberi bantuan (donor) maupun pelaksana/penyalur bantuan kadang memberlakukan masyarakat penerima bantuan secara kurang bermartabat. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas dua yang harus menurut/menerima apa saja yang dibagikan tanpa memperhatikan kebutuhan yang sebenarnya maupun pendapat mereka. Seperti kasus masyarakat Bantul yang merasa dijadikan tontonan maupun obyek promosi, tidak sedikit lembaga bantuan yang hanya memilih desa-desa yang mudah dijangkau dan menjadikannya sebagai sarana untuk mempromosikan perusahaan atau lembaganya. Jumlah bantuan mereka sebenarnya tidak signifikan jumlahnya tetapi mereka mengundang media massa secara besar-besaran untuk meliput. Mereka tidak peduli bahwa desa-desa itu sudah menjadi sasaran dari banyak lembaga bantuan. Mereka hanya memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dan tak mau peduli masih banyak desa yang lebih terpencil yang belum mendapat bantuan.

7) Pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak-anak

Dalam situasi tanggap darurat, karena perhatian para korban tersita pada banyak hal, kaum perempuan dan anak-anak bisa mengalami pelecehan atau dampak negatif dari pihak-pihak lain yang berdatangan. Anak-anak yang kehilangan atau terpisah dari orangtuanya bisa mengalami dampak yang tidak diinginkan karena dibawa ke luar dari desanya oleh pihak lain yang tidak jelas kredibilitasnya. Mungkin tujuannya positif untuk mencari orang tua asuh bagi mereka, tetapi tidak jarang dampaknya sangat buruk dalam jangka panjang. Karena semua hendak dilaksanakan

sesegera mungkin, tidak jarang pengecekan terhadap calon orangtua asuhnya tidak dilaksanakan dengan seksama sehingga mereka justru mengalami kesulitan dalam pertumbuhannya. Demikian juga para remaja perempuan yang bisa saja dijebak oleh tawaran pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab dan justru akhirnya dieksploitasi untuk keuntungan pihak luar itu.

- 8) Program bantuan yang mengganggu kebiasaan/adat/agama yang sudah baik

Kadang ada juga lembaga kemanusiaan yang memakai kegiatannya sebagai kedok untuk memaksakan pesan-pesan yang dapat mengganggu kebersamaan dan keutuhan masyarakat (seperti menyebarkan agama yang berbeda). Praktik semacam ini dapat memicu terjadinya konflik dengan masyarakat yang akan merugikan program bantuan yang sudah dijalankan secara benar dan bertanggung-jawab oleh lembaga-lembaga lain. Pada sisi yang lain, ada lembaga-lembaga yang secara sungguh-sungguh mengusahakan perbaikan pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat atau menghambat (seperti mas kawin yang terlalu mahal, upacara pemakaman yang berlebihan, dsb.) yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga seperti ini perlu diapresiasi karena ingin memperbaiki dan mengoreksi tradisi yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 9) Lembaga kemanusiaan bersaing melayani masyarakat di daerah yang sama

Karena kurang koordinasi atau karena keinginan agar programnya berjalan sesuai target, tidak tertutup kemungkinan dua atau lebih

lembaga kemanusiaan beroperasi di daerah yang sama dengan memberikan pelayanan yang hampir sama. Situasi seperti ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperbandingkan atau bahkan mengadu-domba sehingga menciptakan suasana yang kurang sehat. Contoh Lembaga-A memberikan santunan bagi anak pertama dari suatu keluarga, sedangkan Lembaga-B memberikan santunan bagi anak kedua dari keluarga yang sama dengan jumlah yang agak berbeda sehingga orangtua mereka mengeluhkan perbedaan pelayanan yang didapat oleh kedua anaknya. Kejadian semacam ini pernah muncul di daerah pelayanan.

10) Memicu perpecahan yang lebih mendalam di daerah konflik

Tanpa disadari bantuan kemanusiaan di daerah yang baru saja dilanda konflik justru dapat memperuncing/memicu perpecahan lebih dalam. Bantuan kemanusiaan yang diberikan hanya pada salah satu kelompok saja akan sangat mudah dipersepsikan sebagai pemihakan kepada kelompok tersebut. Akibatnya, kelompok yang tidak menikmati bantuan akan semakin gusar dan konflik bisa semakin parah.

Sosialisasi Penanganan Program Bantuan Kemanusiaan secara Etis

Semua pihak yang terlibat dalam penanganan bantuan kemanusiaan perlu memahami berbagai dampak negatif yang mungkin timbul apabila penanganan bantuan kemanusiaan tidak dilaksanakan dengan benar, baik oleh para donatur/sponsor, pihak pemerintah/regulator, lembaga sosial kemanusiaan (termasuk LSM/NGO), maupun

masyarakat yang menerima bantuan itu sendiri. Semua pihak perlu memahami bagaimana bantuan kemanusiaan ini dapat terlaksana secara bertanggung jawab, baik bantuan yang bersifat tanggap darurat, rekonstruksi, maupun bantuan jangka panjang untuk pemberdayaan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang intensif agar semua pihak yang berkaitan dapat menjalankan peran dan tanggung-jawabnya secara etis.

Sosialisasi untuk Bantuan Kemanusiaan yang Bersifat Tanggap Darurat

Bantuan tanggap darurat sangat mengutamakan kecepatan pelaksanaan dan dampak yang optimal. Proses penanganan bantuan semacam ini harus diatur sesederhana dan se-efektif mungkin. Hal ini dibutuhkan karena kelambanan dalam penyaluran bantuan dapat berakibat pada kelangsungan hidup para korban. Berbagai panduan untuk bantuan tanggap darurat telah banyak diterbitkan oleh berbagai organisasi kemanusiaan yang pada umumnya mencakup hal-hal esensial untuk dijadikan rujukan. Salah satu diantaranya yang dapat dipakai sebagai referensi adalah Buku PANDUAN CUKUP BAIK yang diterbitkan oleh asosiasi Emergency Capacity Building (ECB) yang merupakan upaya bersama dari CARE International, Catholic Relief Services, the International Rescue Committee, Mercy Corps, Oxfam GB, Save the Children, dan World Vision International. Panduan atau standar operasional bantuan kemanusiaan lainnya yang biasa menjadi rujukan lembaga-lembaga kemanusiaan adalah ‘Sphere Standard’ yang menjelaskan tentang standar-standar minimum dalam respon kemanusiaan.

Sedangkan prinsip-prinsip dasar bantuan kemanusiaan dirangkum dalam sebuah dokumen bernama ‘The Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief’ yang diterbitkan bersama oleh International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah) dengan beberapa international NGO. Prinsip ini diadopsi dan ditandatangani oleh sebagian besar lembaga-lembaga yang menjalankan misi bantuan kemanusiaan. Beberapa poin penting yang disebutkan dalam kode etik kemanusiaan ini diantaranya adalah:

- ❖ Panggilan kemanusiaan harus menjadi yang utama
- ❖ Bantuan diberikan tanpa memandang ras, agama, kebangsaan dari penerima bantuan dan tanpa pilih kasih. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kepada kebutuhan.
- ❖ Bantuan tidak akan digunakan untuk mempromosikan kepentingan politik atau keagamaan tertentu.

Masyarakat yang terkena dampak bencana merupakan fokus utama sebagai pihak yang akan menerima bantuan dan manfaat program bantuan tersebut, dan setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak yang terkena dampak merupakan prioritas utama tanpa ada diskriminasi. Oleh karenanya sebagai tanggung-jawab akuntabilitas pelaksana program bantuan, masyarakat harus dilibatkan di setiap tahap pelaksanaan, termasuk diberi informasi apa yang akan dilaksanakan melalui program bantuan, siapa saja yang akan terlibat, ekspektasi atas hasil yang diharapkan, dan kendala yang mungkin terjadi. Mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atas kemungkinan

perubahan-perubahan yang akan mereka alami, mekanisme masukan balik dari masyarakat selama program berlangsung, dan menilai hasil-hasil yang diraih dari program bantuan tersebut. Khusus untuk daerah konflik, penting untuk mengenali konsep 'Do No Harm' dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan sehingga tidak memperburuk keadaan yang sudah sangat sulit. Untuk lebih memahami tentang konsep 'Do No Harm' bisa dipelajari dari buku 'Do No Harm' karangan Mary B. Anderson yang diterbitkan oleh Lynne Rienner Publishers.

Tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antar semua pihak yang terlibat, seperti BNPB, BPBD, SKPD terkait, I-NGO, NGO lokal, UN-OCHA, dsb., sehingga penanganan pemberian bantuan tidak saling tumpang-tindih, dan justru saling mengisi secara terkoordinasi. Koordinasi untuk NGO internasional biasanya dilakukan oleh UN-OCHA sedangkan untuk NGO lokal oleh BNPB/BPBD setempat. Dengan demikian penyaluran bantuan bisa dilakukan secara merata dan optimal serta bisa saling bersinergi. Beberapa asosiasi bantuan kemanusiaan tanggap bencana seperti ECB (untuk NGO internasional) dan HFI untuk NGO internasional dan NGO di Indonesia telah melakukan standar koordinasi antara lain menggunakan standar kualitas bantuan yang sama, saling membagi hasil kajian sehingga dapat mempercepat penyaluran bantuan.

Sosialisasi untuk bantuan kemanusiaan jangka panjang/pemberdayaan masyarakat

Bantuan pemberdayaan masyarakat memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bantuan semacam ini sangat berkaitan dengan perubahan paradigma (mindset) pada kelompok masyarakat yang didampingi, pola kebijakan pemerintah pusat dan

daerah, aturan dan kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat adat setempat, dan tinggi atau rendahnya keinginan dan partisipasi masyarakat untuk mengubah jalan hidupnya. Umumnya, lembaga kemanusiaan yang melakukan pendampingan pemberdayaan memiliki sumberdaya dan dana yang relatif terbatas. Sebab itu, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program yang dijalankan sangat menentukan keberhasilan program. Jika kerjasama dapat dibangun sejak awal hingga pelaksanaannya, dampaknya akan semakin optimal dan pada saatnya akan membawa masyarakat semakin mandiri.

Proses pendampingan pemberdayaan masyarakat biasanya berlangsung antara 10 hingga 15 tahun untuk memastikan terjadinya transfer nilai-nilai dan keahlian guna hidup lebih produktif dan mandiri. Dukungan para ahli dari berbagai bidang, penyediaan sarana penunjang, bibit, modal, pelatihan-pelatihan, dan dukungan kajian lapangan, termasuk permintaan pasar, sangat menentukan peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat. Secara etika bantuan pemberdayaan jangka panjang juga memegang erat aturan main yang dijalankan pada bantuan darurat, seperti prioritas utama pada kepentingan masyarakat, tidak membeda-bedakan latar belakang masyarakat peserta program, dan sebagainya.

Tantangan yang sangat kritikal dalam program pemberdayaan masyarakat jangka panjang adalah justru pada akhir masa program bantuan. Harus dipastikan agar tidak terjadi kegagalan dalam proses transisi kepada masyarakat yang justru bisa menghancurkan tatanan sosial mereka. Sebagai contoh, jika tidak dipersiapkan secara seksama, bisa muncul mental ketergantungan pada bantuan pihak luar, konflik horizontal akibat perebutan aset-aset yang ditinggalkan oleh pemberi bantuan, atau program bantuan tidak bisa dilanjutkan karena

masyarakat belum disiapkan/dibekali keahlian untuk mengelola program.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan dan pelaksanaan program/proyek, yaitu sejak penyusunan strategi program bantuan. Pemberdayaan dan penguatan institusi/kelompok/organisasi masyarakat merupakan bagian dari proses transisi dan keberlanjutan dalam setiap fase perjalanan bantuan kemanusiaan di suatu daerah pelayanan. Demikian pula kelanjutan pendanaan perlu direncanakan secara seksama dan diinformasikan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder), apakah kelanjutan pendanaan akan diupayakan dengan mengakses anggaran pemerintah atau memang direncanakan untuk digali secara swadaya dan swakelola oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh: program Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bisa saja dialihkan pendanaannya melalui anggaran desa, sedangkan komite air bersih dapat dikelola secara swadaya melalui penarikan retribusi bulanan dari anggota masyarakat yang menerima manfaatnya. Tujuan penarikan retribusi bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memastikan agar tersedia dana untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Prioritas utama pemberdayaan adalah kepentingan masyarakat penerima bantuan. Itu sebabnya peran mereka sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan program bantuan, baik sejak penyusunan program-program hingga pelaksanaannya. Mengingat jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang (10-15 tahun) ada cukup waktu untuk mempersiapkan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam memberi masukan tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, di bagian mana mereka bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi, dan

bagaimana mereka bisa mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memastikan kelanjutan program setelah program bantuan diakhiri. Penyusunan program perlu disesuaikan dengan rencana-rencana jangka panjang dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi yang akan menjamin efektivitas dan optimalisasi manfaat program yang dijalankan. Oleh karenanya penting untuk melibatkan program-program advokasi untuk memberi masukan-masukan kepada pemerintah agar regulasi, kebijakan, dan program-program yang dijalankan benar-benar dapat disiapkan dengan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pemahaman etika untuk menghayati dampak positif dan dampak negatif yang dapat terjadi dalam melaksanakan bantuan kemanusiaan jangka panjang perlu disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, lembaga legislatif, lembaga donor, lembaga penyalur/pelaksana bantuan kemanusiaan, dan masyarakat penerima bantuan sebagai mitra yang menikmati dan meneruskan hasil program. Melalui sosialisasi timbal-balik yang intensif akan dapat dilahirkan program-program bantuan kemanusiaan jangka panjang yang lebih berkualitas dan sinergis agar masyarakat mendapatkan manfaat secara optimal dan menikmati keseluruhan proses pemberdayaan.



